



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ANAK TIRI MEMPEROLEH WASIAT WAJIBAH STUDI PUTUSAN NOMOR 878/Pdt.G/2021/PA.Utj TINJAUAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum*



OLEH:

RAHMAT REZKI

12120112499

PROGRAM S1

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYYAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis Putusan Hakim Tentang Anak Tiri
Memperoleh Wasiat *Wajibah* Studi Kasus di Pengadilan Agama Ujung
Tanjung” yang ditulis oleh:

Nama : Rahmat Rezki

NIM : 12120112499

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan
dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 28 April 2025

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Yuni Herlina, SHL., M.Sy.
NIP. 198506022023212041

Dr. Muslim, S.Ag., SH., H.Hum.
NIP. 197205052014111002

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ANAK TIRI MEMPEROLEH WASIAT WAJIBAH STUDI PUTUSAN NOMOR 878/Pdt.G/2021/PA.Utj TINJAUAN HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahmat Rezki
NIM : 12120112499
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Mei 2025
Waktu : 07.30 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1
Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Penguji 2
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Rezki
 NIM : 12120112499
 Tempat/ Tgl. Lahir : Siarang Arang / 09 Desember 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Akhwal –Syakhshiyah (Hukum Keluarga)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ANAK TIRI MEMPEROLEH WASIAT
 WAJIBAH STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 April 2025

Yang membuat pernyataan

Materai



NIM : 12120112499



ABSTRAK

Rahmat Rezki, (2025): Analisis Putusan Hakim tentang Anak Tiri Memperoleh Wasiat *Wajibah* Studi Kasus di Pengadilan Agama Ujung Tanjung

Dalam hukum kewarisan, harta warisan yang ditinggalkan pewaris akan dibagikan kepada orang-orang yang termasuk ahli waris sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh al-Qur'an. Dalam kitab-kitab fiqih dijelaskan paling tidak ada dua alasan yang menjadikan seseorang bisa saling mewarisi dengan orang lain sebab nasab dan sebab *musyaharah* (pekawinan).

Penelitian ini membahas dua hal utama: pertama, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan wasiat *wajibah* terhadap anak tiri pada perkara nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Utj dan kedua, analisis terhadap putusan tersebut menurut hukum Islam. Dan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Agama No. 878/Pdt.G/2021/PA.Utj mengenai pemberian hak waris kepada anak tiri melalui wasiat *wajibah* serta tinjauan hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Sumber penelitian yang digunakan meliputi sumber primer yaitu putusan Pengadilan Agama No. 878/Pdt.G/2021/PA.Utj dan Kompilasi Hukum Islam serta bahan sekunder seperti buku-buku, jurnal dan bahan bacaan lain terkait dengan penelitian ini. Data yang ada dalam penelitian ini dikumpulkan dengan mengumpulkan buku-buku yang relevan dengan pembahasan dan teknik analisis yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam putusan No. 878/Pdt.G/2021/PA.Utj adalah Putusan ini menunjukkan penerapan hukum Islam yang kontekstual dan memberikan perlindungan hukum yang adil kepada seluruh pihak yang terlibat. Kedua, berdasarkan tinjauan hukum Islam, tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, yang memang tidak memberikan hak waris kepada anak tiri, karena anak tiri tidak memiliki hubungan darah dengan *muwarris* (pewaris). Selain itu wasiat *wajibah* di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah* hanya anak angkat dan orang tua angkat bukan anak tiri.

Kata Kunci: Warisan, hukum Islam, anak tiri, wasiat *wajibah*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam, yang mana dengan rahmat serta karunia-Nya skripsi yang berjudul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ANAK TIRI MEMPEROLEH WASIAT WAJIBAH STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG”** ini dapat penulis selesaikan. Shalawat beriringkan salam semoga selalu terlimpahkan atas Nabi Muhammad SAW. yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam dan menghilangkan kebodohan dari muka bumi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari banyak pihak sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Ayah Zamzami dan Omak Yeni Marlina, dua sosok yang paling berjasa dan paling saya cintai dalam hidup saya, yang telah banyak berkorban dan selalu ada untuk memberikan semangat, kasih sayang, do’a, dan motivasi kepada penulis. Semoga Allah SWT. panjangkan umur keduanya dan Allah SWT berkahi hidupnya di dunia hingga akhirat kelak. Untuk kakak dan adik perempuan saya, Sintia Rahma Yani dan Siti Aisyah yang selalu menyayangi dan memberi semangat kepada penulis dalam menjalani dunia pendidikan hingga menyelesaikan bangku perkuliahan ini.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti Ms, SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd selaku Wakil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., MA., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Ibu Yuni Harlina, SHI, M.Sy selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Muslim, S.Ag., SH., M.Hum selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag. yakni Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah Ikhlas mengajarkan ilmu dan pengetahuannya dari awal perkuliahan sampai akhir.
8. Seluruh jajaran pegawai Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan layanan dan menyediakan referensi yang menunjang penelitian ini.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Angkatan 2021 terlebih untuk Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*)

B yang telah kompak dan solid dari semester satu sampai akhir semester ini.

Dan juga rekan-rekan yang berada di manunggal untuk selalu membantu dalam menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terkhusus buat

Faudar Ahmad, M. Reza Syahfahlevi, Maulidul Arzaq, M. Rofi'i, M. Rois Maulana, Nuval Azhari Sinaga, Sony Mayul Hendra.

10. Jodoh penulis kelak kamu adalah salah satu alasan penulis menyelesaikan

skripsi ini, meskipun saat ini penulis tidak mengetahui keberadaanmu. Karena penulis yakin bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan takdirmu tidak akan pernah melewatkanmu.

Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi banyak orang dan bisa menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan semoga Allah SWT. menilai usaha ini sebagai ibadah di sisiNya.

Pekanbaru, April 2025

Penulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teori.....	10
1. Pengadilan Agama.....	10
2. Hakim	20
3. Kewarisan.....	26
4. Wasiat	36
B. Penelitian Terdahulu.....	46
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	50
B. Objek Penelitian	50
C. Sumber Data	50
D. Teknik Pengumpulan Data	51
E. Teknik Analisis Data	52
F. Teknik Penulisan.....	52
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung No. 878/Pdt.G/2021/PA.Utj.....	53
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Putusan Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung No 878/Pdt.G/2021/PA.Utj	58



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	69
-----------------------------	-----------





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang sempurna dan universal, kesempurnaan ajaran agama Islam yang masuk kedalam sistem kehidupan manusia semuanya pasti akan berhubungan dengan hukum. Salah satu yang akan menjadi fokus pengaturan ajaran agama Islam adalah mengenai harta benda. Dalam Islam banyak sekali cara yang dibolehkan untuk menafkahkan sebagian harta, ada yang berbentuk hibah, sedekah, wakaf, zakat dan wasiat.¹

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, piutang, maupun manfaat untuk dimiliki oleh penerima wasiat sebagai pemberian yang berlaku setelah wafat yang berwasiat. Menurut Kompilasi Hukum Islam, wasiat yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.²

Firman Allah Swt surah An-nisa (4) ayat 11:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينَ

“Warisan tersebut dibagi setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya.”³

¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 273.

² Mardani, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014), h. 107.

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al- Quran Balitbang Diklat Kemenag RI 2019), h. 106.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari ayat di atas, penyebutan wasiat didahulukan atas penyebutan utang, padahal yang wajib adalah melunasi utang dulu baru setelah itu wasiat yang ada dilaksanakan. Hal ini mengandung arti sebagai dorongan dan perintah untuk memperhatikan dan memenuhi wasiat yang ada serta larangan mengingkarinya.⁴

Secara umum wasiat adalah seseorang memberikan hartanya kepada orang lain atau kepada beberapa orang setelah ia meninggal dunia atau ia memerdekakan budaknya, baik ia ucapkan lafaz wasiat maupun ia tidak ucapkan.⁵ Seseorang yang meninggal dunia paling tidak akan meninggalkan dua hal. Pertama meninggalkan ahli waris dan yang kedua meninggalkan harta peninggalan. Harta peninggalan dari si mati, belum dapat dibagi sebab dalam hal ini harus dikurangi biaya penyelenggaraan jenazah, melunasi hutang dan wasiat.⁶

Dasar dari wasiat itu sendiri adalah surah Al-Baqarah (2) ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَلَدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿١٨٠﴾

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”⁷

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah.Syariah.Manhaj (Al-Baqarah- Ali 'Imran-An-Nisaa')* Juz 3 & 4 (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 615.

⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Terjemah oleh Abu Usamah Fakhur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam 2016), Cet Ke-1, Jilid 2, h. 671.

⁶ Wahyu Muljono, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya*, (Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB 2010), h. 12.

⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 36.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Ziauddin

Ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Menurut pandangan yang lebih kuat pemberian wasiat itu merupakan suatu hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai *mawaris* (pembagian harta warisan).⁸

Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas, Hasan al-Bashri, Thawus, Masruq, dan lain-lain menafsirkan ayat tersebut berpendapat bahwa wasiat kepada (orang tua dan kerabat) yang asalnya wajib, sampai sekarang masih tetap diberlakukan. Akan tetapi, sebagian ulama seperti Ibnu Umar, Abu Musa al-Asy'ari, Sa'id Ibnul, Musayyab, dan lain-lain berpendapat bahwa hukum wasiat kepada kerabat yang tidak mewarisi hanyalah sunnah, karena kewajiban berwasiat telah *dimansukh* oleh ayat-ayat kewarisan yang memberikan kepastian terhadap pembagian harta peninggalan.⁹

Golongan yang mewajibkan wasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak memperoleh warisan berpendapat bahwa ayat wasiat tersebut tidak *mansukh*, tetapi tetap berlaku sampai sekarang untuk kerabat yang tidak mendapatkan warisan karena ada suatu penghalang pewarisan atau ada orang yang lebih utama dari mereka. Oleh karena itu, wajib dibuatkan wasiat *wajibah* dengan nas wasiat, sedangkan untuk kerabat yang mendapat warisan dipergunakan ayat-ayat kewarisan. Selanjutnya, wasiat *wajibah* juga bersandar berdasarkan hadis yang melarang untuk memberi wasiat harta kekayaan kepada ahli

⁸ M. Abdul Ghofar, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), Cet. Ke-1, Jilid 1, h. 429.

⁹ Alyasa Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Madzhab*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 191.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

warisnya sendiri menjelaskan konsep wasiat harta dalam Islam ditujukan kepada kerabat jauh atau kerabat yang tidak mendapatkan hak waris.¹⁰

Dalam konsep hukum Islam kontemporer selain wasiat dikenal juga istilah wasiat *wajibah* yaitu suatu wasiat yang wajib untuk diberikan. Secara teori wasiat *wajibah* mempunyai arti sebagai tindakan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat *wajibah* bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan pada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.¹¹

Wasiat *wajibah* pertama kali muncul di Mesir sebagai perundang-undangan hukum waris tahun 1964 untuk mengatasi adanya pandangan bahwa cucu *termahjub* oleh anak laki-laki. Dalam undang-undang hukum wasiat mesir, wasiat *wajibah* diberikan terbatas kepada cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan mereka tidak mendapatkan harta warisan disebabkan kedudukannya sebagai *dzawil arham* atau terhijab oleh ahli waris lain.¹²

Berawal dari terjadinya kritikan keras oleh masyarakat Mesir terhadap Code Napoleon yang diterapkan di Mesir (karena saat itu Mesir dijajah Perancis). Masyarakat Mesir menyatakan bahwa hukum Islam sanggup memenuhi kebutuhan negara dalam pembentukan perundang-undangan. Dari kejadian inilah muncul gejolak upaya pembaruan hukum dari berbagai pihak,

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 131.

¹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 462.

¹² Eko Setiawan, "Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis", Volume 1, No. 2, *Muslim Heritage* (2017), h. 45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari kalangan tradisional maupun reformis, salah satunya pembaruan hukum dalam bidang hukum keluarga.¹³

Di Indonesia, konsep wasiat *wajibah* ini diterapkan untuk anak angkat dan orang tua angkat yang dituangkan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :¹⁴

1. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
2. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sedangkan menurut para ahli hukum Islam pada umumnya yang mengidentifikasikan bahwa cucu sebagai penerima wasiat *wajibah*, bukan anak angkat ataupun orang tua angkat. Alasan KHI memberi wasiat *wajibah* kepada anak angkat atau orang tua angkat karena kekerabatan. Kekerabatan yang ada dalam ranah hukum anak angkat atau orang tua angkat, juga didapati pada hubungan kekeluargaan antara anak tiri dengan orang tua tiri. Bahkan anak tiri atau orang tua tiri mempunyai kedekatan yang lebih baik dari pada anak angkat, yakni: hubungan darah dengan salah seorang ibu, ayah sebagai suami isteri dalam sebuah rumah tangga, hubungan sosiologi yang terjalin dalam keluarga, kesukaan dan keagamaan yang sama.¹⁵

¹³ Naili Fadhilah, "Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia", Volume 3, No. 1, *Al-Mawarid: JSYH* (2021), h. 39.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 209, (Bandung: CV Nuansa Aulia 2020), h. 61.

¹⁵ Hasan Basri, et.al. "Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat)", Volume 2, No. 3, *Jurnal Ilmu Hukum* (2014), h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KHI tidak mengatur secara tuntas tentang kedudukan anak tiri baik dalam hukum perkawinan maupun hukum kewarisan. KHI tidak memberikan definisi terhadap anak tiri. Pengertian secara umum tentang anak tiri adalah adalah anak bawaan suami atau istri yang bukan hasil perkawinan dengan istri atau suami yang sekarang.

Berdasarkan data terbaru yang penulis peroleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Ujung Tanjung, sepanjang Tahun 2025 tercatat terdapat 29 kasus perkara tentang kewarisan yang diajukan ke Pengadilan Agama Ujung Tanjung.

Salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Ujung Tanjung terjadi perselisihan sengketa waris, di mana harta-harta pewaris tersebut belum pernah diwariskan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Dalam kasus ini yang menarik dari putusan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung ialah Hakim menetapkan anak tiri penerima wasiat *wajibah* dan mendapatkan 1/3 dari harta warisan. Maka dari itu penulis merasa tertarik membahas mengenai: Analisis Putusan Hakim Tentang Anak Tiri Memperoleh Wasiat *Wajibah* Studi Putusan Nomor 878/Pdt./G/2021/PA.Utj. Tinjauan Hukum Islam

B. Batasan Masalah

Supaya penulisan ini terarah dan tidak lari dari topik yang akan dipermasalahkan maka penulis hanya akan membahas tentang Anak Tiri Memperoleh Wasiat *Wajibah* pada persidangan Pengadilan Agama pada putusan nomor 878/Pdt./G/2021/PA.Utj.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, maka dalam penelitian ini pokok masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung dalam memutuskan perkara dalam menetapkan bagian wasiat *wajibah* terhadap anak tiri pada perkara harta warisan No 878/Pdt.G/2021/PA.Utj?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan putusan hakim dalam perkara No 878/Pdt.G/2021/PA.Utj?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan penelitian sebagai berikut:
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga anak tiri bisa mendapatkan wasiat *wajibah*.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan putusan hakim mengenai anak tiri bisa mendapatkan wasiat *wajibah*.
2. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:
 - a. Bagi Akademisi
Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum wasiat *wajibah* terhadap anak tiri dan juga memberikan kontribusi wajah hukum di Indonesia
 - b. Bagi Praktisi
Sebagai pertimbangan bagi praktisi ketika ingin merevisi peraturan perundang-undangan yang membahas wasiat *wajibah* anak tiri.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang hukum wasiat *wajibah* serta mengetahui bagaimana cara pembagian wasiat *wajibah* anak tiri yang sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

d. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengadilan agama

a. Pengertian pengadilan

Peradilan dalam pembahasan fiqih diistilahkan dengan *qadha'* (قضاء) istilah tersebut diambil dari kata yang memiliki arti memutuskan, menyempurnakan, menetapkan. Adapun secara makna terminologi, peradilan adalah suatu lembaga pemerintah atau negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan keputusan perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁶

Seperti dalam firman Allah QS. An-Nisa (4) : 135

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”.¹⁷

¹⁶ <https://an-nur.ac.id/peradilan-islam-pengertian-fungsi-dan-hikmahnya/>, diakses pada tanggal 08 Mei 2024, jam 02.28 wib

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit.*, h. 134.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat ini menjelaskan tentang perintah yang bersifat umum untuk menegakkan keadilan di antara manusia.

Dalam berbagai kajian peradilan, terdapat dua istilah yang dianggap sinonim yaitu peradilan dan pengadilan. Keduanya berasal dari kata adil akan tetapi secara konseptual beda arti.¹⁸

Peradilan adalah salah satu pranata/institusi dalam memenuhi hajat hidup orang banyak/masyarakat dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Adapun pengadilan adalah suatu organisasi yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan tersebut. Meskipun demikian, terkadang kedua istilah tersebut selalu diartikan dalam pengertian yang sama.¹⁹

Berdasarkan pengertian diatas, pengertian pengadilan agama dapat diartikan sebagai kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk mendirikan hukum keadilan.²⁰

b. Kewenangan pengadilan agama

Kewenangan pengadilan agama dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan absolute (*absolute compatitie*) dan kewenangan relative (*relative compatitie*).

¹⁸ H. Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2019), Cet.Ke-1, h. 37.

¹⁹ Cik Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, (Bandung: Rosdakarya, 1997), h. 36.

²⁰ *Ibid*, h. 37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Kewenangan absolut pengadilan agama

Kompetensi absolut (Wewenang mutlak) adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili, dan dalam bahasa Belanda disebut *attributie van rechtsmacht*. Atau kewenangan yang berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa.²¹

Sebagai peradilan khusus, pengadilan agama mempunyai tugas dan kewenangan tertentu seperti tersebut pada pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang pengadilan agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam,²² di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.

a) Bidang hukum perkawinan atau hukum keluarga meliputi perkara-perkara :²³

(1) Izin poligami beserta penetapan harta dalam perkawinan poligami

²¹ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 102.

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5078 Tentang Peradilan Agama

²³ M. Khoirur Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Izin kawin apabila orang tua calon suami/isteri tidak mengizinkan sementara calon suami /isteri dibawah usia 21 tahun
- (3) Dispensasi kawin bagi calon suami/isteri yang beragama Islam dan belum mencapai usia 19 dan 16 tahun.
- (4) Penetapan wali *adhol* jika wali calon isteri menolak menikahkannya.
- (5) Permohonan pencabutan penolakan perkawinan oleh KUA.
- (6) Permohonan pencegahan perkawinan.
- (7) Pembatalan perkawinan.
- (8) Permohonan pengesahan nikah/istibat nikah.
- (9) Pembatalan penolakan perkawinan campuran (perkawinan antar warga negara yang berbeda).
- (10) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri.
- (11) Cerai talak (perceraian yang diajukan suami).
- (12) Cerai gugat (perceraian yang diajukan isteri).
- (13) Talak *khuluk* (perceraian yang diajukan oleh isteri dengan membayar tebusan kepada suami).
- (14) *Li'an* yaitu cerai talak atas dasar alasan isteri berzina dengan pembuktian beradu sumpah antara suami isteri.
- (15) *Syiqaq* yaitu cerai gugat atas dasar alasan perselisihan suami isteri dengan penunjukan hakam (juru damai) dari keluarga kedua belah pihak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (16) Kewajiban nafkah dan *mut`ah* bagi bekas isteri.
 - (17) Gugatan harta bersama termasuk hutang untuk kepentingan keluarga.
 - (18) Gugatan penyangkalan anak.
 - (19) Permohonan/ gugatan pengakuan anak.
 - (20) Gugatan hak pemeliharaan anak.
 - (21) Gugatan nafkah anak.
 - (22) Permohonan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap pemeliharaan anak.
 - (23) Permohonan perwalian.
 - (24) Gugatan pencabutan kekuasaan wali.
 - (25) Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada dibawah kekuasannya.
 - (26) Pengangkatan anak oleh WNI yang beragama Islam terhadap anak WNI yang beragama Islam.
- b) Dalam perkara waris, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:²⁴
- (1) Permohonan penetapan ahli waris dan bagiannya masing-masing.
 - (2) Gugatan waris
 - (3) Akta dibawah tangan mengenai keahlian warisan.

²⁴ *Ibid*, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (4) Akta komparasi tentang pembagian harta waris di luar sengketa.
- c) Dalam perkara wasiat, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:
 - (1) Gugatan pengesahan wasiat.
 - (2) Gugatan pelaksanaan wasiat.
 - (3) Gugatan pembatalan wasiat.
 - (4) Hibah
 - (5) Gugatan pengesahan hibah.
 - (6) Gugatan pembatalan hibah.
- d) Dalam perkara wakaf, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:
 - (1) Sengketa sah tidaknya wakaf.
 - (2) Sengketa pengelolaan harta wakaf.
 - (3) Sengketa keabsahan dan kewenangan nadlir wakaf
 - (4) Gugatan sengketa wakaf oleh kelompok (*class action*).
- e) Dalam perkara Zakat, Infak, dan Sedekah, pengadilan agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi:²⁵
 - (1) Sengketa antara Muzakki dengan BAZIS.
 - (2) Sengketa antara Pejabat pengawas dengan BAZIS.

²⁵ *Ibid*, h. 23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(3) Sengketa antara Mustahik dengan BAZIS.

(4) Sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan baik sendiri maupun *class action* dengan BAZIS.

f) Adapun dalam kegiatan bisnis syariah, sengketa yang menjadi wewenang pengadilan agama adalah meliputi:

(1) Sengketa akibat beda menafsiri akad perjanjian.

(2) Sengketa sah tidaknya akan perjanjian.

(3) Sengketa berakhirnya suatu akad perjanjian.

(4) Gugatan ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

(5) Gugatan atas pelanggaran akad perjanjian.

2) Kewenangan relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan atau wewenang yang diberikan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama jenis dan tingkatan yang berhubungan dengan wilayah hukum pengadilan dan wilayah tempat tinggal/tempat kediaman atau domisili pihak yang berperkara.²⁶ Artinya, bahwa suatu pengadilan hanya berwenang mengadili perkara yang subjeknya atau objeknya berada pada wilayah pengadilan yang bersangkutan.²⁷ Misalnya: antara pengadilan agama Jakarta selatan dengan pengadilan agama Jakarta barat. Jadi kompetensi relatif

²⁶ Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimal Press, 2018), h. 29.

²⁷ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hukum acara perdata adalah untuk menjawab: ke Pengadilan Agama mana gugatan harus diajukan?

Kompetensi relatif ini pada pokoknya diatur dalam Pasal 142 RBg/118 HIR, sebagai berikut :²⁸

- a) Gugatan dapat diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Atau, jika tidak diketahui tempat tinggalnya, gugatan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman senyatanya dari tergugat. Ketentuan ini sesuai dengan asas actor "*sequitur forum rei*".
- b) Apabila tergugat lebih dari satu, yang tempat tinggalnya tidak terletak dalam wilayah satu pengadilan agama, gugatan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi salah satu tempat tinggal tergugat, yang dipilih penggugat. Apabila para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka gugatan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang berhutang pokok (debitur).
- c) Jika tempat tergugat tidak diketahui demikian juga tempat kediaman senyatanya tidak diketahui, atau tergugat tidak dikenal, gugatan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah

²⁸Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020), Cet.Ke-1, h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat atau salah satu penggugat.

- d) Apabila telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, gugatan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilihnya tersebut.
 - e) Dalam hal gugatannya mengenai barang tetap, gugatan diajukan ke pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap tersebut. Jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan agama, gugatan diajukan ke salah satu pengadilan agama yang wilayah hukumnya meliputi letak barang tetap itu.
- c. Sumber hukum pengadilan agama

Sumber hukum pengadilan agama terbagi atas dua yaitu, hukum formil dan hukum materil. Hukum formil bertujuan untuk menjamin untuk ditaatinya hukum materil, oleh karena itu hukum formil memuat tentang cara bagaimana melaksanakan dan mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum materil.²⁹

Berikut ini adalah hukum yang dipergunakan dalam pengadilan agama:³⁰

1) Sumber hukum formil:

- a) HIR.

²⁹ <https://pa-seirampah.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berperkara/269-hukum-acara>, diakses pada tanggal 08 Mei 2024, jam 05.28 wib.

³⁰ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, h.55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) RBG.
 - c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .
 - d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
 - e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - g) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
 - i) Yurisprudensi.
 - j) PERMA dan SEMA.
 - k) Kompilasi Hukum Islam.
 - l) Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan Peradilan Agama.
- 2) Sumber hukum materil:³¹
- a) Al-Qur'an dan Hadist.

³¹ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II, h.56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR).
- c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
- f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- g) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- h) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- i) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- j) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- k) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- l) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- n) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- o) PERMA Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
- p) Peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan Ekonomi Syariah.
- q) Yurisprudensi.
- r) Qanun Aceh.
- s) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- t) Akad Ekonomi Syariah.

2. Hakim

a. Pengertian hakim

Hakim berasal dari kata **حَكَمَ-يَحْكُم-حَاكِم** yang mempunyai arti memutuskan, menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang bisa menyelesaikan perkara. Menurut syara' seorang pejabat yang melakukan tugas kehakiman atau pejabat yang diberikan wewenang oleh kepala pemerintah untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan persengketaan-persengketaan.³²

Pasal 11 UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap UU No. 7 Tahun 1989, disebutkan bahwa hakim adalah

³² Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Syarat dan tata cara pengangkatan, pemberhentian, serta pelaksanaan tugasnya mempunyai ketentuan tersendiri dalam undang-undang. Menurut Pasal 1 Undang-undang tersebut yang dimaksud hakim disini adalah hakim pengadilan agama dan hakim pengadilan tinggi agama. Selain itu, ada juga pengadilan khusus. Ia adalah Hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dalam waktu tertentu, yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.³³

b. Dasar hukum hakim

Adapun dasar hukum mendirikan *al-qadhi* sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis adalah sebagai berikut:

1) Q.S An-Nisa (4) : 135

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ ۚ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ
 اَوْ اِلْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۚ فَلَا
 تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚ وَاِنْ تَلَوْا اَوْ تَعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
 خَبِيْرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan

³³ Aah Tsamarotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.”³⁴

Ayat ini menjelaskan tentang perintah yang bersifat umum untuk menegakkan keadilan di antara manusia. Perintah ini disebutkan langsung setelah perintah untuk berlaku adil terhadap anak-anak yatim dan kaum perempuan. Karena tegaknya suatu masyarakat tidak bisa terwujud melainkan dengan keadilan serta menjaga sistem dan aturan. Begitu juga, suatu kekuasaan tidak akan bisa bertahan lama melainkan dengan keadilan, karena keadilan adalah suatu pilar atau pondasi keberlangsungan dan keberlanjutan suatu kekuasaan.³⁵

- 2) Hadist dari Abu Hurairah menurut riwayat imam bukhari dan Muslim:

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ³⁶

“Husain bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma’mar mengabarkan kepada kami, dari sufyan ats-Tsauri, dari Yahya bin Sa’id, dari Abu Bakar bin Amr bin Hazm, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah saw bersabda, “jika seorang hakim memutuskan suatu putusan lalu ia berijtihad dan benar (putusannya), maka baginya dua pahala. Namun, jika ia memutuskan suatu putusan lalu salah (dalam putusannya), maka baginya satu pahala”.

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 3 Aqidah.Syariah.Manhaj (An-Nisaa’ – al-Maa’idah) Juz 5 & 6* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 307.

³⁶ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Bandung: Jabal, 2023), h. 310.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kewenangan hakim pengadilan agama

Secara umum, wewenang hakim adalah meneliti sebab-sebab serta menetapkan hukum berdasarkan sebab-sebab tersebut.³⁷ Sebagai pelaku kekuasaan yang merdeka, maka hakim harus memahami ruang lingkup, tugas dan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Setelah memahami tugas dan kewajibannya, hakim harus berupaya secara professional dalam menjalankan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.

Dengan demikian tugas hakim dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:³⁸

- 1) Tugas pokok di bidang peradilan (teknis yudisial) di antaranya:
 - a) Menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya
 - b) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orangnya.
 - c) Membantu para pencari keadilan dan berusaha segigih-gigihnya dalam mengatasi segala hal demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - d) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak/kurang

³⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 13.

³⁸ Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas, melainkan menjadi kewajiban untuk memeriksa dan mengadili.

- 2) Tugas yuridis, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat-nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga-lembaga negara apabila diminta.
 - 3) Tugas akademis/ilmiah, yaitu dimana hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.³⁹
- d. Syarat-syarat menjadi hakim

Dalam hukum positif menjadi seorang hakim telah ada regulasi yang ditetapkan oleh lembaga peradilan mengenai syarat-syarat yang harus terpenuhi. Adapun syarat hakim secara umum adalah sebagai berikut :⁴⁰

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 4) Sarjana Hukum (Syarat Hakim Pengadilan Umum)
- 5) Sarjana Syari'ah, Sarjana Hukum Islam atau Sarjana Hukum yang menguasai Hukum Islam (Syarat Hakim Pengadilan Agama)
- 6) Lulus pendidikan hakim

³⁹ *Ibid*, h. 69.

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban
- 8) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela
- 9) Berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun
- 10) Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 11) Beragama Islam (Hakim Pengadilan Agama)

Sedangkan dalam hukum Islam juga telah diatur beberapa syarat yang harus dipenuhi warga negara yang ingin menjadi seorang hakim. Adapun syarat-syarat untuk menjadi seorang hakim menurut al-Mawardi adalah sebagai berikut:⁴¹

- 1) Sehat jasmani rohani
- 2) Kecerdasan dan kemampuan
- 3) Bebas atau merdeka
- 4) Islam
- 5) Laki-laki
- 6) Keadilan
- 7) Menguasai sumber hukum

Empat di antara tujuh syarat di atas, disepakati bersama oleh ulama dari berbagai kalangan madzhab. Keempat syarat tersebut adalah sehat jasmani rohani, kecerdasan dan kemampuan, bebas

⁴¹ Mohammad Hamdan Asyrofı, “Syarat Hakim Menurut al-Mawardi dan Hakim Profesional”, artikel dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/361-syarat-hakim-menurut-al-mawardi-dan-hakim-profesional>. Diakses pada 9 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merdeka, dan Islam. Sedangkan tiga syarat lainnya masih diperdebatkan oleh para ulama, tiga syarat tersebut yaitu laki-laki, keadilan, dan penguasaan sumber hukum (*ijtihad*).

3. Kewarisan

a. Pengertian kewarisan

Waris secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata *Al-mirats*. Bentuk masdhar dari kata *waritsa-yaritsu-miratsan*. Makna menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum yang lain. Pengertian menurut bahasa ini tidaklah terbatas hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non harta. Sedangkan *Al-mirats* menurut istilah yang dikenal para ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli waris yang masih hidup baik yang ditinggalkan berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar'i.⁴²

Sementara secara terminologi, ilmu *faraid* memiliki beberapa definisi, yaitu:

- 1) Ilmu yang mempelajari tentang tatacara pembagian warisan kepada yang berhak menerimanya.
- 2) Ilmu tentang aturan dan peraturan dari fiqih dan hisab (hitungan), yang diketahui dengannya setiap bagian ahli waris.

⁴² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Disebut juga dengan fiqh al-Mawaris dan ilmu al- hisab untuk mengetahui dan menghitung setiap harta waris yang ditinggalkan.
- 4) Hukum yang mengatur tentang perpindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ilmu *faraid* atau ilmu mawaris, yaitu ilmu yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'* Ulama dan *Ijtihad* Ulama, untuk mengetahui ahli waris yang dapat mewarisi dan yang tidak dapat mewarisi, dan mengetahui kadar bagian setiap ahli waris serta tata cara pembagiannya.⁴³

b. Dasar hukum kewarisan

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam Al-Quran dan sunnah nabi. Ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut.

1) Al-Qur'an

a) Al-qur'an Surah ke 4 (An-Nisa) ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan

⁴³ Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, (Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020), Cet Ke-1, h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”⁴⁴

Ketentuan dalam ayat di atas, merupakan landasan utama yang menunjukkan, bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak waris, dan sekaligus merupakan pengakuan Islam, bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Tidak demikian halnya pada masa jahiliyah, di mana wanita dipandang sebagai objek bagaikan benda biasa yang diwariskan.⁴⁵

- b) Al-qur'an Surah ke 4 (An-Nisa) ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu)

⁴⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op. Cit*, h. 105.

⁴⁵ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), Cet. 2. h.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴⁶

Pada ayat sebelumnya, Allah SWT menjelaskan tentang hak waris kerabat secara global. Kemudian selanjutnya di dalam ayat *mawaarits* ini, Allah SWT menjelaskan secara terperinci bagian masing-masing ahli waris, berapa bagian anak-anak, berapa bagian ayah dan ibu berapa bagian suami istri dan berapa bagian saudara seibu. Sedangkan bagian saudara seayah dijelaskan di bagian akhir surah an-Nisa.⁴⁷

2) Hadist

Adapun dasar hukum waris dalam hadist Rasulullah SAW. Adalah sebagai berikut:

- a) Hadist dari Ibnu Abbas menurut riwayat imam Bukhari dan Muslim:

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit.* h. 106

⁴⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2, Op. Cit.* h. 612.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ^{٤٨}

“Dari Ibnu Abbas RA., ia berkata, “Rasulullah SAW. berkata, “Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu sisanya untuk laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya).”

Dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa pembagian harta warisan diberikan untuk ahli waris sesuai bagiannya masing-masing terlebih dahulu. Lalu, jika terdapat sisa dari harta warisan tersebut, maka sisa itu diberikan kepada *ashabah*.

c. Rukun dan syarat waris

Rukun waris adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris, dimana bagian harta waris tidak akan didapatkan bila tidak ada rukun-rukunnya. Rukun-rukun untuk mewarisi ada tiga yaitu:

- 1) *Al-Muwarriis* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki (sebenarnya) maupun *hukmi* (suatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hakim) seperti *mafqud* (orang yang hilang).
- 2) *Al-Waris* (ahli waris), yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan

⁴⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op. Cit*, h. 290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan atau orang yang hilang.

- 3) *Al-Maurus* (harta warisan), yaitu harta benda yang menjadi warisan. Termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan, seperti hak *qisas* (perdata), hak menahan barang yang belum dilunasi pembayarannya, dan hak menahan barang gadaian.

Inilah tiga rukun waris. Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris mewarisi tidak dapat dilaksanakan. Jika seorang meninggal dunia namun tidak memiliki ahli waris, atau ada ahli waris tapi tidak ada harta yang ditinggalkan, maka waris mewarisi tidak bisa dilakukan, karena tidak memenuhi rukun waris.⁴⁹

Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga, yang mana jika syarat tidak tercukupi maka waris tidak dapat dilaksanakan. Adapun tiga syaratnya yaitu:

- 1) Meninggalnya pewaris, baik secara hakiki yakni kematian seseorang yang diketahui dengan jelas tanpa harus ada pembuktian, hukmi yaitu kematian seseorang ditetapkan oleh keputusan hakim dengan pertimbangan beberapa hal, dan taqdiri yakni kematian seseorang berdasarkan suatu dugaan yang kuat dan anggapan bahwa orang tersebut betul-betul telah meninggal dunia.⁵⁰

⁴⁹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Op. Cit*, h. 11.

⁵⁰ Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan dalam Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), h. 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Ahli waris adalah orang yang hidup saat pewaris meninggal dunia dan bukan pembunuh dari pewaris.
- 3) Memahami dasar-dasar ilmu kewarisan Islam, ikatan antara pewaris dengan ahli waris yang akan menerima hak waris setelah pewaris meninggal dunia dan lebih spesifik tentang kadar pembagian harta warisan. Misalnya, karena hubungan pernikahan yakni antara suami istri dan hubungan nasab antara ibu dan anak.

d. Sebab-sebab menerima warisan dan penghalang warisan

1) Hubungan perkawinan (*Al-Mushaharah*)

Yaitu akad perkawinan yang sah meskipun belum terjadi hubungan intim dan berdua-duaan. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah SWT Q.S. An-Nisa (4): 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ

“Kalian berhak mendapat harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian”.

وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ

“Dan mereka (para wanita) juga berhak mendapat harta yang ditinggalkan suami-suami mereka”.⁵¹

Berdasarkan ayat di atas yang berhak mewarisi karena pernikahan adalah suami istri. Masing-masing mewarisi pasangannya berdasarkan ayat ini.

⁵¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Op.Cit*, h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hubungan nasab

Ahli waris nasab adalah ahli waris yang menerima warisan karena mereka memiliki hubungan darah dengan si mati, yaitu hubungan nasab atau keturunan, baik ke bawah, ke atas, maupun ke samping. Ahli waris *nasabiyah* semuanya berjumlah 20 orang jika diperinci baik dari kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. laki-laki 13 orang dan perempuan 8 orang.

Kelompok ahli waris *nasabiyah* yang laki-laki secara berurutan dapat disebutkan secara terperinci sebagai berikut:

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki
- c) Bapak
- d) Kakek dari garis bapak dan seterusnya ke atas
- e) Saudara laki-laki sekandung
- f) Saudara laki-laki sebapak
- g) Saudara laki-laki seibu
- h) Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i) Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak
- j) Paman sekandung
- k) Paman sebapak
- l) Anak laki-laki paman sekandung
- m) Anak laki-laki paman sebapak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Ahli waris kelompok perempuan dari golongan *nasabiyah* terdapat 8 ahli waris jika diperinci, mereka adalah:

- a) Anak Perempuan
- b) Cucu perempuan keturunan laki-laki dan seterusnya ke bawah
- c) Ibu
- d) Nenek garis ibu
- e) Nenek garis bapak
- f) Saudara Perempuan sekandung
- g) Saudara Perempuan Sebak
- h) Saudara Perempuan seibu

Urutan-urutan pada nomor daftar ahli waris *nasabiyah* di atas menandakan jauh dekatnya hubungan kekerabatan ahli waris terhadap si mati. Karena itu biasanya ahli waris pada urutan awal akan selalu mendapatkan bagian dan dalam sistem hijab-mahjub biasanya yang dekat akan menutupi ahli waris yang lebih jauh.⁵²

3) Nasab hukum / budak

Sebab mewarisi ini terjadi karena seseorang telah memerdekakan seorang budak, maka apabila budak tersebut meninggal dunia dan meninggalkan harta, orang yang telah membebaskan budak tersebut berhak untuk menjadi ahli waris dari budak tersebut, tapi budak tersebut tidak berhak untuk mewarisi dari orang yang memerdekakannya. Perbudakan merupakan

⁵² Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (ISBN: Pustaka Radja, 2016), h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan antara dua orang yang sebenarnya tidak memiliki hubungan darah namun tampak seperti memiliki ikatan darah sebagaimana hubungan keturunan atau kekerabatan. Oleh karena itu, seseorang akan menjadi *maula* dari budak yang telah ia bebaskan/ merdekakan dan inilah yang membuatnya memiliki hak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh budak yang ia merdekakan apabila budak tersebut meninggal dunia.⁵³ Bagian warisan *maula*/orang yang merdekakan budak ini adalah bagian *ashabah*.

Sebab-sebab Penghalang kewarisan itu ialah:

1) Pembunuhan

Para ulama sepakat bahwa pembunuhan yang sengaja yang diharamkan adalah penghalang warisan, sehingga barang siapa membunuh pemberi warisnya secara zhalim maka dia tidak mewarisinya.⁵⁴

2) Perbedaan agama

Larangan pemberian warisan diantara orang berbeda agama ini telah menjadi kesepakatan para sahabat, *tab'in* dan seluruh fuqaha. Dengan demikian, jika ada seorang suami muslim

⁵³ Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, (Serang: A-Empat, 2021), h.

42.

⁵⁴ Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar*, (Jakarta: Darul Haq, 2019), Cet. 7, h. 450.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal dunia, maka istrinya yang beragama nasrani atau yahudi tidak berhak mendapatkan warisan yang ditinggalkannya.⁵⁵

3) Perbudakan

Budak tidak mewarisi kerabatnya, karena apabila dia mewarisi, maka warisannya dimiliki oleh majikannya, tanpa dia ikut serta mendapatkannya. Dia juga tidak diwarisi karena dia tidak punya kepemilikan apapun.⁵⁶

4. Wasiat

a. Pengertian wasiat

Wasiat berasal dari kata *washâ* yang artinya menyampaikan. Misalnya *washaitu asy-syai'a, ūshī asy-syai'a*, artinya aku menyampaikan sesuatu. Dengan demikian, pemberi wasiat berarti menyampaikan apa yang ada pada saat hidupnya setelah kematian. Wasiat menurut istilah syariat adalah hibah seseorang kepada orang lain berupa barang, hutang, atau, manfaat, dengan ketentuan pihak yang diberi wasiat berhak memiliki pemberian tersebut setelah kematian pemberi wasiat.⁵⁷ Wasiat dalam pengertian ilmu fiqh (hukum Islam) adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), h. 538.

⁵⁶ Abdul Aziz Mabruk Al-ahmadi, dkk, *Loc. Cit.*

⁵⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ahli bahasa Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), Jilid 5, h. 588.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- 1) Menurut al Ibyani, wasiat adalah sistem kepemilikan yang disandarkan kepada keadaan sesudah matinya orang yang berwasiat secara sukarela, dapat berupa benda atau manfaatnya.⁵⁸
 - 2) Menurut Sayid Sabiq, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain, baik berupa benda, hutang atau manfaat dengan syarat orang yang menerima wasiat itu memiliki kemampuan menerima hibah setelah matinya orang yang berwasiat.⁵⁹
 - 3) Menurut Ibnu Rusyd, wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain mengenai hartanya atau kepada beberapa orang yang kepemilikannya terjadi setelah matinya orang yang berwasiat.⁶⁰
 - 4) Menurut Muhammad Sarbini al-Khatib, wasiat adalah memberikan sesuatu dengan kemauan sendiri yang dijalankan sesudah orangnya meninggal dunia.⁶¹
 - 5) Undang-undang wasiat Mesir no. 71 tahun 1946 pasal 1 menyebutkan bahwa wasiat itu merupakan tindakan seseorang terhadap harta peninggalannya yang disandarkan kepada keadaan sudah mati.⁶²

Pendapat Imam Syafi'i "jika seseorang meminta izin untuk mewasiatkan kepada ahli waris sewaktu ia masih sehat atau sakit, dan para ahli waris mengizinkannya atau tidak sama, maka yang demikian itu sama saja. Jika para ahli waris menepati wasiat itu kepada orang yang

⁵⁸ Moh. Yasir Fauzi, "Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah dan Hibah Dalam Hukum Islam", Volume 9, No. 1, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2017), h. 104-105.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, h. 588.

⁶⁰ Ibnu Rusyd, *Op. Cit*, h. 671.

⁶¹ Moh. Yasir Fauzi, *Op. Cit*, h. 104-105.

⁶² *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diwasiatkan, maka hal itu adalah baik bagi mereka dan lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah SWT. Jika mereka tidak melaksanakannya, maka seorang hakim (penguasa) tidak dapat memaksa mereka untuk melakukan sesuatu, sebagaimana yang dinukilkan dari Rasulullah SAW tentang warisan.⁶³

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُوصِيَ لِوَارِثٍ فَقَالَ لِلْوَرِثَةِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ بِثُلَاثِي مَالِي لِفُلَانٍ وَأَنْتُمْ وَرَثَتِي فَإِنْ أَجَزْتُمْ ذَلِكَ فَعَلْتُ وَإِنْ لَمْ تَجْزُوا أَوْصَيْتُ بِثُلَاثِي مَالِي لِمَنْ تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ لَهُ فَأَشْهَدُوا لَهُ عَلَى أَنْفُسِكُمْ بِأَنَّكُمْ قَدْ أَجَزْتُمْ الَّذِي أَوْصَيْتُ لَهُ جَمِيعَ مَا أَوْصَيْتُ لَهُ وَعَلِمْتُمْ ثُمَّ مَاتَ فَخَيْرٌ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ عِرٍّ وَجَلٍ أَنْ تَجْزُوهُ لِأَنَّ فِي ذَلِكَ صَدَقًا وَوَفَاءً بِوَعْدٍ وَبِرًّا لِلْحَيِّ وَالْمَيِّتِ وَطَاعَةً لِلْمَيِّتِ وَبِرًّا لِلْحَيِّ فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا لَمْ يُجِبْهُمْ الْحَاكِمُ عَلَى إِجَازَتِهِ وَلَمْ يَخْرِجْ ثُلْثَ مَالِ الْمَيِّتِ فِي شَيْءٍ يَخْرِجُهُ لِمِثْلِ ذَلِكَ.

“Imam Syafi’i berpendapat bahwa boleh berwasiat kepada ahli waris jika disetujui oleh ahli waris lainnya. Sebagaimana ungkapan beliau: “Apabila seseorang bermaksud berwasiat kepada ahli waris lalu ia berkata kepada para ahli waris: “Saya bermaksud berwasiat dengan sepertiga harta saya kepada si fulan, ahli waris saya. Jika kalian membolehkannya maka akan saya lakukan dan jika kalian tidak membolehkannya, maka saya akan berwasiat kepada orang yang boleh menerima wasiat”, kemudian para ahli waris memberikan persaksian kepada orang yang berwasiat bahwa mereka membolehkan segala sesuatunya dan mereka mengetahuinya, lalu yang berwasiat itu meninggal dunia, maka kebaikanlah yang ada pada mereka (para ahli waris) atas pembolehan wasiat itu. Karena pada yang demikian itu ada kebenaran, menepati janji, jauh dari tipu-menipu, dan termasuk suatu bentuk ketaatan. Jika mereka (para ahli waris) tidak melakukan itu, maka mereka tidak dapat dipaksa oleh hakim agar membolehkannya. Ia juga tidak mengeluarkan sedikitpun dari sepertiga harta orang yang meninggal dunia, jika tidak dikeluarkan sendiri oleh orang yang meninggal dunia”.⁶⁴

⁶³ Muhammad bin Idris Asy-Syafi’i, *Al-Umm. Jilid II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990) h. 121.

⁶⁴ *Ibid.* h. 144.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa: Apabila seseorang berwasiat sesuatu kepada ahli waris, lalu ia berkata: "jika wasiat ini dibolehkan oleh para ahli waris lainnya. Jika tidak, maka wasiat itu untuk sifulan atau untuk fisabilillah atau untuk seseorang yang boleh berwasiat kepadanya", jika mereka (para ahli waris) membolehkannya, maka wasiat itu boleh. Jika mereka menolaknya maka harus dilaksanakan wasiat itu untuk orang yang diberi wasiat, karena wasiat itu bukan untuk ahli waris.

Di kalangan ahli hukum mazhab Hambali dijelaskan bahwa wasiat akan menjadi wajib apabila wasiat yang tidak dilakukan akan membawa akibat hilangnya hak-hak atau peribadatan, seperti diwajibkan bagi orang yang menanggung kewajiban zakat, haji atau kifarot maupun nazar. Wasiat menjadi sunnah jika berwasiat kepada kerabat yang miskin dan tidak bisa mewarisi, dengan syarat orang yang berwasiat tersebut meninggalkan harta yang banyak dan tidak melebihi sepertiga harta. Wasiat menjadi makruh jika wasiat dilaksanakan oleh orang yang tidak meninggalkan harta yang cukup, sedangkan ia mempunyai ahli waris yang membutuhkannya. Wasiat menjadi haram jika wasiat dilaksanakan melebihi sepertiga harta yang dimilikinya, atau berwasiat kepada orang yang berburu harta dan merusak. Wasiat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi mubah jika dilaksanakan tidak sesuai dengan petunjuk syariat, seperti berwasiat kepada orang yang mempunyai banyak harta.⁶⁵

Dari penjelasan di atas dapat penulis artikan bahwa wasiat adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan diberikan setelah meninggalnya si pemberi wasiat dan si penerima wasiat harus sesuai dengan syarat-syarat penerima wasiat.

b. Dasar hukum wasiat

Secara umum ada beberapa legalitas yang mendukung dalam mendasari wasiat. Diantaranya dengan al-Qur'an dan hadist, sebagaimana pemaparan di bawah ini:

1) Al-Qur'an

a) Al-Qur'an Surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.⁶⁶

Ayat ini mengandung perintah untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kaum kerabat. Menurut pandangan yang lebih kuat pemberian wasiat itu merupakan

⁶⁵ Syafi'I, Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam di Indonesia, Volume 02, No. 02, Misykat (2017), h.121-122.

⁶⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai *mawaris* (pembagian harta warisan).⁶⁷

Dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi dua kelompok; ada kelompok yang menyetujui adanya konsep wasiat dan kelompok yang tidak menyetujuinya. Kelompok yang tidak menyetujui adanya wasiat adalah jumhur ulama yang berpandangan bahwa memberikan wasiat kepada ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan adalah sunnah bukan wajib. Pendapat yang mereka pegang adalah pertama, kata “kutiba” yang bermakna diwajibkan yang terdapat pada surat al-Baqarah ayat 180 telah dihapus dengan ayat-ayat mawaris yang sudah menjelaskan bagian masing-masing ahli waris, sehingga mereka sudah tidak boleh lagi mendapatkan harta waris melalui wasiat. Sedangkan kelompok yang menyetujui adanya wasiat adalah Abu Abdullah Muhammad bin Umar al-Razi, Sayyid Qutb, Muhammad Abduh, Said bin Jabir, Rabi' bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Ibnu Abbas, Al-Hasan, Ibnu Hazm. Argument yang digunakan adalah perintah kewajiban memberikan wasiat yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 180 kepada orangtua dan sanak kerabat tetap berlaku, namun hanya bagi orang tua atau sanak kerabat yang terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya

⁶⁷ M. Abdul Ghofar, *Loc.Cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena perbedaan agama karena perbedaan agama merupakan salah satu sebab seseorang tidak mendapatkan harta warisan.⁶⁸

- b) Al-qura'n Surah ke 4 (An-Nisa) ayat 11 :

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ج

“Warisan tersebut dibagi setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya”.⁶⁹

Para ulama salaf dan khalaf sepakat bahwa utang piutang lebih didahulukan dari pada wasiat.⁷⁰ Dari penjelasan diatas bahwa wasiat dapat dilakukan apabila seseorang wafat dan merupakan kewajiban bagi ahli waris untuk ditunaikan. Dalam ayat kedua tersebut dapat disimpulkan juga bahwa wasiat dapat dilakukan apabila seluruh utang telah dilunasi barulah wasiat dapat dilaksanakan.

2) Hadist

Adapun dasar hukum wasiat dalam hadist Rasulullah Saw adalah Sebagai berikut:

- a) Hadist dari Ibnu Umar menurut riwayat imam Bukhari dan Muslim:

⁶⁸ Zakiul Fuady Muhammad Daud, “Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri)”, Volume 6, No. 1, Jurnal As-Salam (2022), h. 51.

⁶⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Loc. Cit.*

⁷⁰ M. Abdul Ghofar, *Op. Cit.*, h. 313.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ يَيْتٌ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ^{٧١}

“Dari Ibnu Umar katanya: Bahwa Rasulullah Saw bersabda: Tidak berhak keatas seseorang Islam menyimpan sesuatu barang yang hendak diwasiatkannya selama dua malam kecuali wasiatnya itu telah dituliskannya.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Dari penjelasan hadis ini Allah SWT telah bersedekah kepada orang-orang muslim dimana mereka diberikan hak untuk membelanjakan dan mewasiatkan 1/3 hartanya walaupun setelah mereka meninggal dunia, bahkan diberi ganjaran pahala di atas kesediaannya berbuat demikian. Dianjurkan berwasiat. Ini merupakan *ijma'* ulama, tetapi mereka berbeda pendapat ada yang wajib atau sebaliknya.

Menurut jumhur ulama, hukumnya sunnah. Menurut Abu Dawud, mazhab Zahiri, Imam al-Syafi'I dalam mazhab qadim, hukum wasiat adalah wajib. Ini juga pendapat al-Zuhri, Atha', Ishaq, al-Isfiraini dan Ibn Jarir.⁷²

- b) Hadist dari Ibnu Abbas menurut riwayat imam Bukhari dan Muslim:

⁷¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Op. Cit.*, h. 293.

⁷² Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram Jilid 3*, Terjemah Aminudin Basir dkk, (Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication 2010), h. 317.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ
الثُّلُثِ إِلَى الرَّبْعِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ
وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ⁷³

“Dari Ibnu Abbas katanya: Walaupun manusia mau mengurangkan satu pertiga menjadi satu perempat karena Rasulullah Saw bersabda: “Satu pertiga dan satu pertiga itu banyak.”(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa larangan untuk mewasiatkan separoh harta, bahwa perbuatan ini dilarang. Alasannya bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik.⁷⁴

Dari dua legalitas ini, yaitu Al-Quran dan hadist maka dapat kita ketahui bersama bahwa wasiat merupakan suatu ketentuan yang terlegitimasi dalam pensifatan hukumnya karena semua dalil yang tertera diatas mengarahkan adanya ketentuan yang mengharuskan dalam pelaksanaan wasiat tersebut.

c. Rukun dan syarat wasiat

Rukun dan syarat wasiat menurut ajaran Islam terdiri dari 4 macam, yaitu:

- 1) Adanya pemberi (pewasiat/*mushih*), syariat yang dianjurkan untuk orang yang berwasiat ialah yang memiliki kesanggupan untuk

⁷³ *Ibid*, h. 294.

⁷⁴ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari Jilid 15*, Terjemah Amiruddin dkk, (Jakarta: Pustaka Azzam), h. 426.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melepaskan hak miliknya kepada orang lain, oleh sebab itu *mushih* adalah orang yang baligh, berakal dan merdeka.

Selain itu *mushih* juga disyariatkan untuk ridha dan tidak terpaksa ataupun dipaksa terhadap wasiat yang dilakukannya.⁷⁵

Maka dapat disimpulkan bahwa pemberi wasiat disyaratkan untuk memiliki hal sebagai berikut:

- a) Beragama Islam
 - b) Sudah *baligh*
 - c) Orang yang berakal
 - d) Orang merdeka
 - e) Amanah (dapat dipercaya)
 - f) Cakap untuk menjalankan sebagaimana, yang dikehendaki oleh yang berwasiat.
- 2) Adanya pihak penerima wasiat atau yang menerima wasiat (*mushalahu*), dengan syarat orang tersebut bukan ahli warisnya
 - 3) Adanya sesuatu yang diwasiatkan adalah milik pewaris tanpa tersangkut hak sedikutpan kepada orang lain. Dengan kata lain bahwa harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat (Pasal 194 ayat (2) KHI). Dalam hal ini perwasiatan dipahami lebih bersifat materil/kebendaan, yang oleh karenanya benda tersebut harus merupakan miliknya sendiri.

⁷⁵ Zakiyah Daradjat, *Ilmu Fiqih III*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998), hlm. 170.

- 4) Pelaksanaan wasiat. Pelaksanaan wasiat maksudnya pernyataan untuk melakukan wasiat.⁷⁶

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, adanya suatu wasiat yang wajib direalisasikan jika ada seseorang yang pernah berwasiat (*mushiih*). Jika tidak pernah ada orang yang berwasiat maka tidak akan pernah wasiat yang harus dilaksanakan.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi: Feni Rosmala Rosa, pada tahun 2021, jurusan Ahwal Syakhsiyyah, fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, judul skripsi “Hak Wasiat *Wajibah* Anak Angkat Dalam KHI di Indonesia Perspektif Maqashid Syari’ah”. Persamaannya sama-sama membahas wasiat *wajibah*, perbedaannya Penulis membahas anak tiri memperoleh wasiat *wajibah*, sedangkan skripsi saudara Feni Rosmala Rosa membahas anak angkat
2. Skripsi: Miftahul Jannah, pada tahun 2022, jurusan Hukum Keluarga Islam, fakultas syari,ah dan ekonomi islam Institut Agama Islam Curut, judul skripsi “Wasiat *Wajibah* Dalam Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dari Masalahah”. Persamaannya sama-sama membahas wasiat *wajibah*, perbedaannya Penulis membahas anak tiri memperoleh wasiat *wajibah*, sedangkan skripsi saudara Miftahul Jannah membahas wasiat *wajibah* dalam KHI ditinjau dari masalahah.

⁷⁶ H. Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018), h. 229-231.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Skripsi: Marsiani, pada tahun 2016, jurusan Al-Ahwal Asy-syakhsiyyah, fakultas syari'ah dan hukum Universitas Sunan Kalijaga, judul skripsi "Wasiat *Wajibah* Untuk Anak Tiri (Analisis Terhadap Ketentuan HKI)". Persamanya sama-sama membahas wasiat *wajibah* untuk anak tiri, perbedaannya penulis melalui analisis putusan hakim, sedangkan saudara Marsiani analisis terhadap KHI.
4. Skripsi: Neneng Khosyatilah, pada tahun 2015, jurusan Hukum Keluarga, fakultas syari'ah dan hukum Universitas Syarif Hidayatullah, judul skripsi "Penetapan Bagian Warisan Non Muslim Dengan Wasiat *Wajibah* di Pengadilan Agama Jakarta Barat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam". Persamanya sama-sama mengkaji analisis putusan hakim, perbedaannya, penulis membahas wasiat *wajibah* untuk anak tiri, sedangkan saudara Neneng Khosyatilah membahas wasiat *wajibah* untuk non muslim.
5. Skripsi: Fitriatul Awalliah, pada tahun 2013, jurusan perbandingan *mazhab* dan hukum, fakultas syari'ah dan hukum UIN Alauddin Makassar, judul skripsi "Analisis Konsep Wasiat *Wajibah* Perspektif Ibnu Hazm dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia". Persamanya sama-sama membahas wasiat *wajibah* tetapi penulis melalui analisis putusan, sedangkan saudara Fitriatul Awalliah membahas konsep wasiat *wajibah* perspektif Ibnu Hazm.
6. Skripsi: Edo Iskandar, pada tahun 2019, jurusan Hukum Keluarga, fakultas syari'ah dan hukum Universitas Syarif Hidayatullah, judul skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Pemberian Wasiat *Wajibah* Kepada Anak Tiri”. Persamannya sama-sama membahas wasiat *wajibah* untuk anak tiri dan menganalisis putusan hakim, perbedaannya penulis hanya mengkaji satu putusan sedangkan saudara Edo Iskandar mengkaji dua putusan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

7. Skripsi: Danang Nofianto, pada tahun 2020, jurusan Hukum Keluarga, fakultas syari’ah dan hukum UIN Suska Riau, judul skripsi “Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Bagian Wasiat *Wajibah* Bagi Anak Angkat”. Persamannya sama-sama membahas wasiat *wajibah* dan menganalisisa putusan hakim, perbedaannya penulis membahas anak tiri sedangkan saudara Danang Nofianto membahas anak angkat.
8. Skripsi: Roslina Harahap, pada tahun 2020, jurusan Hukum Keluarga, fakultas syari’ah dan hukum UIN Suska Riau, judul skripsi “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Tentang Keadilan Sebagai Alasan Dalam Menetapkan Bagian Wasiat *Wajibah* Terhadap Anak Angkat”. Persamannya sama-sama membahas wasiat *wajibah* dan menganalisisa putusan hakim, perbedaannya penulis membahas anak tiri sedangkan saudari Roslina Harahap membahas anak angkat.
9. Skripsi: Marinda Para Dita, pada tahun 2017, jurusan Ahwal Al Syakhsiyyah, fakultas syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, judul skripsi “Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif *Maqashid* Syariah”. Perbedaannya, penulis membahas pembagian harta waris melalui wasiat

wajibah, sedangkan saudari Marinda Para Dita membahas pembagian harta waris dalam adat jawa.

10. Skripsi: Muhammad Naufal Shidiq, pada tahun 2022, jurusan Hukum Keluarga, fakultas syari'ah dan hukum Universitas Syarif Hidayatullah, judul skripsi “Penerapan Wasiat *Wajibah* Untuk Ahli Waris Non Muslim di Pengadilan Agama Surabaya”. Persamannya sama-sama membahas wasiat *wajibah* akan tetapi penulis membahas tentang anak tiri sedangkan saudara Muhammad Naufal Shidiq membahas tentang ahli waris non muslim.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, kitab-kitab maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan. Maka jenis penelitian ini disebut dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan data sekunder saja.⁷⁷

B. Objek Penelitian

Objek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung perkara harta warisan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Utj tentang bagian wasiat *wajibah* terhadap anak tiri.

C. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka data primer tidak di pakai, yang dipakai adalah data sekunder. Yang mana data sekunder diperoleh dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek

⁷⁷ Bambang Sugiono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 184.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, salah satunya seperti putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁸ Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah salinan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung tentang perkara harta warisan No. 878/Pdt.G/2021/Pa.Utj.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku-buku dan tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan dengan objek penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah seperti rancangan undang-undang, buku-buku, atau pendapat pakar hukum Islam. Diantaranya adalah: *Kompilasi Hukum Islam*, *Fiqh Islam* karya *Sulaiman Rasjid*, *Fiqh Sunnah* karya *Sayyid Sabiq*, *Fiqh Mawaris* karya *Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, *Fiqh Sunnah* karya *Sayyid Sabiq*, *Shahih Bukhari Muslim* karya *Muhammad Fuad Abdul Baqi*, dan buku lainnya yang berkenaan dengan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan buku tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, jurnal-jurnal yang terkait.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data ini, penulis menggunakan metode dokumentasi yaitu sebuah metode yang dilakukan dengan cara mencari dan mengkaji data-data dari buku-buku, catatan-catatan, dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

⁷⁸ Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 106.

E. Teknik Analisis Data

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu setelah penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan cara menghubungkan dengan teori dan bahan bacaan dan selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang akan diteliti.

F. Teknik Penulisan

1. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deduktif, deduktif merupakan mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.
2. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan Kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam perkara waris antara pewaris dan anak tiri, hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung memutuskan dalam putusan Nomor 878/Pdt.G/2021/PA.Utj, anak tiri berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta pewaris. Pengadilan Agama mengeluarkan putusan ini dengan alasan melihat kepada hubungan ibu tiri dengan anak tirinya yang dirawat dan dibesarkan oleh pewaris (ibu tirinya) seperti menganggap anak kandungnya sendiri, ditambah dengan kesepakatan dari ahli waris lainnya penggugat, bahwa tergugat (anak tiri) tetap diberikan harta warisan dari ibu tirinya.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pemberian harta warisan melalui wasiat wajibah yang diputuskan oleh Pengadilan Agama untuk anak tiri tidak sesuai dengan aturan yang ada dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, yang memang tidak memberikan hak waris kepada anak tiri, karena anak tiri tidak memiliki hubungan darah dengan *muwarris* (pewaris). Selain itu wasiat *wajibah* di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 209 yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah* hanya anak angkat dan orang tua angkat bukan anak tiri. Hakim tentunya tidak boleh melakukan penafsiran hukum dan tetap patuh pada ketentuan atau aturan yang sudah ada, sehingga setelah diteliti, hakim dalam Putusan No.

878/Pdt.G/2021/PA.Utj yang menetapkan anak tiri mendapatkan wasiat wajibah belum sesuai dengan Hukum Waris Islam Indonesia.

B. Saran

Setelah memaparkan dan menganalisis dan mendapatkan kesimpulan, terdapat beberapa saran yang penulis ingin sampaikan dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagi pembaca, skripsi ini dapat dijadikan bahan kajian untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan persoalan di tengah keluarga dan masyarakat.
2. Bagi peneliti berikutnya diharapkan menelaah skripsi ini sehingga kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini dapat dilengkapi oleh peneliti selanjutnya.
3. Penulis merekomendasikan agar pengadilan agama melakukan kajian lebih lanjut tentang wasiat wajibah dan memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari Jilid 15*, Terjemah Amiruddin dkk, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram Jilid 5*, ISBN: Pustaka Azzam 2006.
- Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- _____. *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafik, 2009.
- Ali Ash-Shabuni, Muhammad, *Pembagian Harta Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- ‘Allusy, Abu Abdullah bin Abd al-Salam, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram Jilid 3*, Terjemah Aminudin Basir dkk, Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publication 2010.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Fiqh Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asikin, Zainal, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenamedia Group, 2016.
- Asy-Syafi’i, Muhammad bin Idris, Al-Umm, Beirut: Dar Al-Fikri, 1990.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid 8 Damaskus: Dār Al-Fikr, 1989.
- _____. *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 3 Aqidah.Syariah.Manhaj (An-Nisaa’ – al-Maa’idah) Juz 5 & 6*, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- _____. *Terjemah Tafsir Al-Munir Jilid 2 Aqidah.Syariah.Manhaj (Al-Baqarah – Ali ‘Imran – An-Nisaa’) Juz 3 & 4*, Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Bakar, Alyasa Abu, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fiqh Madzhab*, Jakarta: INIS, 1998.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Shahih Bukhari Muslim*, Bandung: Jabal, 2023.

Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia*, Bandung: Rosdakarya, 1997.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqih III*, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1998.

Fahrullah, Ade Fariz, *Konsep Kewarisan dalam Islam*, Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019.

Fuadah, Aah Tsamarotul, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.

Ghofar, M. Abdul, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, Cet. Ke-1, Jilid 1, 2008.

Hakim, Lukman dan Endang Hadrian, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2020.

Harahap, M. Yahya, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (UU No.7 Tahun 1989)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hikmatullah, *Fiqh Mawaris: Panduan Kewarisan Islam*, Serang: A-Empat, 2021.

Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad, *"Bidayatul Mujtahid"*, Terjemah oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet Ke-1, Jilid 2, 2016.

Issa, Abu Issa Muhammad bin, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut: Dar Ar-Risalah Al-Alamiyyah, 2009.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Edisi Penyempurnaan 2019*, Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Quran Balitbang Diklat Kemenag RI 2019.

Lubis, Suhrawardi K. Chairu Ummam Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Mabruk, Abdul Aziz Al-Ahmadi, dkk, *Fikih Muyassar*, Jakarta: Darul Haq, 2019.

Magono, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Manan, Abdul, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI*, Jakarta: Prenademia Group, 2019.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mardani, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2014.
- Muhibbussabry, *Fikih Mawaris*, Medan: CV Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Muljono, Wahyu, *Hukum Waris Islam dan Pemecahannya*, Yogyakarta: Magister Ilmu Hukum FH-UJB 2010.
- Mustofa, Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Nawawi, Maimun, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, ISBN: Pustaka Radja, 2016.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian Pendidikan Skripsi, tesis, disertai karya ilmiah*, Jakarta: Prenada Group, 2011.
- Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000
- Rofiq, M. Khoirur, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sodik, M. Ali dan Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Yulia, *Hukum Acara Perdata*, Aceh: Unimal Press, 2018.



B. Jurnal

Abd. Halim, “Wasiat Wajibah dan Perkembangan Penerapannya Dalam Putusan Mahkamah Agung”, Volume 6, No. 2, *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)* (2018)

Eko Setiawan, “Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis”, Volume 1, No. 2, *Muslim Heritage* (2017)

Hasan Basri, et.al. “Perspektif Wasiat Wajibah Terhadap Anak Tiri (Kajian Persamaan Hak dengan Anak Angkat)”, Volume 2, No. 3, *Jurnal Ilmu Hukum* (2014)

Maimun, “Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam”, Volume 9, No. 1, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2017), h.9.

Moh. Yasir Fauzi, “Pembagian Harta Dengan Wasiat Wajibah dan Hibah Dalam Hukum Islam”, Volume 9, No. 1, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2017)

Naily Fadhilah, “Pembaruan Hukum Waris Islam: Wasiat Wajibah Mesir dan Relevansinya Dengan Konsep Waris Pengganti Indonesia”, Volume 3, No. 1, *Al-Mawarid: JSYH* (2021)

Syafi'i, “Wasiat Wajibah Dalam Kewarisan Islam di Indonesia”, Volume 02, No. 02, *Misykat* (2017)

Zakiul Fuady Muhammad Daud, “Menyoal Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Anak Tiri (Studi Putusan Hakim Terhadap Kasus Warisan Anak Tiri)”, Volume 6, No. 1, *Jurnal As-Salam* (2022)

C. Undang-Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 878/P.dt.G/2021/PA.Utj.

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Website

<https://an-nur.ac.id/peradilan-islam-pengertian-fungsi-dan-hikmahnya/>, diakses pada tanggal 08 Mei 2024, jam 02.28 wib

[https://pa-seirampah.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur - berpekara/269-hukum-acara](https://pa-seirampah.go.id/index.php/kepaniteraan/prosedur-berperkara/12-prosedur-berpekara/269-hukum-acara), diakses pada tanggal 08 Mei 2024, jam 05.28 wib.

Mohammad Hamdan Asyrofi, “*Syarat Hakim Menurut al-Mawardi dan Hakim Profesional*”, artikel dari <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/361-syarat-hakim-menurut-al-mawardi-dan-hakim-profesional>. Diakses pada 9 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG ANAK TIRI MEMPEROLEH WASIAT WAJIBAH STUDI PUTUSAN NOMOR 878/Pdt.G/2021/PA.Utj TINJAUAN HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Rahmat Rezki
NIM 12120112499
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 23 Mei 2025
Waktu : 07.30 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Juni 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk

Sekretaris
Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1
Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

Penguji 2
Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003